

ABSTRAK

Suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Seperti pada kasus Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang objeknya yakni sebidang tanah atau lahan belum memiliki sertipikat dan masih berstatus sengketa. Meski demikian, para pihak dalam perjanjian tersebut berkehendak untuk mengadakan transaksi jual beli atas tanah objek perjanjian, sehingga menimbulkan pertanyaan akan legalitas dari perjanjian tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengenai keabsahan dari PPJB sebelum terciptanya akta jual beli yang sempurna serta Untuk mengetahui akibat hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apabila syarat – sayaratnya tidak dapat dipenuhi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui pengolahan data untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk penarikan kesimpulan, digunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian bahwa keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ditinjau melalui Pasaal 1320 KUHPerdara yakni adanya unsur subjektif dan objektif, akibat hukum dari PPJB tersebut adalah mengikat para pihak sejak dibuatnya perjanjian dan tidak menghilangkan dampak hukum apabila perjanjian dilanjutkan oleh ahli waris.

Tujuan skripsi ini dibuat adalah untuk mengetahui mengenai pengabsahan dari PPJB sebelum terciptanya akta jual beli yang sempurna serta mengetahui akibat hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) apabila syarat – sayaratnya tidak dapat dipenuhi.

Kata Kunci : *Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Perikatan Bersyarat*

ABSTRACT

A legal relationship in the field of property wealth of the between two or more people in which one party is entitled to something and the other parties liable for something. As in the case of Binding sale and purchase Agreements that the object i.e., piece of land or area does not yet have the certificate and still a dispute. However, the parties to the agreement wanted to make buying and selling over land Treaty objects, so that raises the question of the legality of the agreement will be.

The purpose of the research is to find out about validity from PPJB before the creation of the deed of sale and purchase the perfect as well as to know the legal consequences of Binding sale and purchase Agreements in terms of conditions can not be met.

The method of the approach used in this study is the juridical normative references by researching or secondary data. Specification of research used in this study is through data processing for a systematization of materials against written law. This research was conducted by gathering primary and secondary data composed of primary legal materials, legal secondary materials, and legal materials tertiary. In conclusion, for the withdrawal method of qualitative analysis of data used.

The results of research that the validity of the binding sale and purchase Agreement is reviewed through Pasaal 1320 KUHPerdata i.e. the existence of the subjective and objective elements, the legal consequences of such PPJB is binding on the parties since he made the Covenant and does not eliminate the impact of the law in the Treaty followed by the beneficiary.

The purpose of this thesis was to find out about pengabsahan from PPJB before the creation of the deed of sale and purchase the perfect as well as knowing legal consequences of Binding sale and purchase Agreements in terms of conditions can not be met.

Key Words: *Binding Sale And Purchase Agreements (PPJB), A Conditional Alliance*